

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berbagai permasalahan hukum, tindakan kecurangan, penyimpangan, serta penyalahgunaan wewenang sebagai akibat dari adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan merupakan wujud dari pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Efektivitas pelaksanaan pengawasan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) menjelaskan bahwa pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif

dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 48 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Menurut Falah (2005) (dalam Salju dkk, 2014), Inspektorat Daerah mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab yang diembannya. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007,

dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan baik dalam inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Peran APIP dapat terwujud jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga siapapun auditor yang bertugas dapat menghasilkan mutu hasil audit yang sama.

Auditor internal memiliki peranan penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai penilai kecukupan struktur pengendalian intern, penilai efektivitas, dan penilai kualitas kerja. Kemampuan seorang auditor dapat terlihat dari kecakapan profesionalnya dalam menjalankan profesinya sebagai auditor. Kecakapan profesional dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaannya. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang standar audit, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. Peraturan ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.

Menurut Lubis (2015) (dalam Suharti dkk, 2017) pengalaman kerja auditor merupakan lamanya masa kerja auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan auditor. Dengan adanya pengalaman kerja dalam bidang audit

maka seorang auditor akan melakukan tugas pemeriksaannya dengan baik serta bijaksana dalam berfikir. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilat (2015) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat.

Perilaku dan sikap yang baik tercermin dari integritas auditor itu sendiri yang mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab atas laporan yang dihasilkan. Integritas merupakan prinsip perilaku yang harus dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab yang ada dalam diri auditor menjadikan dasar kepercayaan publik akan kualitas hasil kerja auditor. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Tikasari (2013) yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Hal ini diperkuat pula dengan hasil penelitian dari Erina dkk, (2012) dan Baisary (2013)

Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal, dengan adanya suatu komitmen maka dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik sehingga kinerjanya juga akan meningkat. Komitmen harus diawali dari pimpinan ataupun pejabat pemerintah sehingga dapat dibangun pada bawahannya. Pimpinan APIP adalah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan komitmen pimpinan

APIP merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.

Wilayah Gunungsitoli khususnya di Pemerintah Kota Gunungsitoli menjadi objek dalam penelitian ini karena masih banyaknya kasus yang bergulir berkaitan dengan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan besarnya jumlah temuan kerugian daerah serta penyimpangan yang bermuara pada korupsi tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal akan tetapi menjadi temuan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Annesa, dkk (2013), pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kinerja APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No. 60/LHP/XVILMDN/06/2017 menyatakan bahwa masih lemah dan kurang tertibnya sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli, serta adanya temuan yang mengakibatkan kerugian daerah mengindikasikan bahwa kinerja inspektorat yang ada belum sesuai yang diharapkan dan bahkan Kota Gunungsitoli masih mendapat Opini WDP dari BPK seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Katili, dkk (2017), rendahnya kapabilitas APIP disebabkan oleh beberapa hal antara lain, lemahnya manajemen APIP, kurangnya formasi auditor, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan masih belum diterapkannya pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik. Hal ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan bagi auditor inspektorat dan pimpinannya untuk terus berupaya meningkatkan kinerja auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu berbagai upaya peningkatan kapabilitas APIP harus terus dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Beberapa penelitian yang membahas tentang kinerja aparatur pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Katili, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pada inspektorat provinsi dan Kabupaten Kota Gorontalo”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial variabel kecakapan profesional dan pengalaman kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor disebabkan oleh adanya mutasi yang tidak berpola dan tidak mempertimbangkan kaderisasi auditor sehingga pegawai yang berpengalaman atau yang telah lama bekerja di Inspektorat tergantikan dengan pegawai yang belum berpengalaman. Akibatnya pegawai yang telah lama bekerja di inspektorat tidak selalu dilibatkan dalam penugasan pemeriksaan, sehingga auditor tersebut tidak dapat mengasah ketrampilannya dalam penugasan audit. Selain itu, ditemukan bahwa kecakapan profesional yang meliputi keahlian, dan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan teknis auditing dan akuntansi, tidak didukung

dengan peningkatan kemampuan penunjang dibidang lainnya seperti hukum, sosial politik, pengembangan teknologi informasi, kecakapan teknik dan ilmu pemerintah lainnya, sedangkan integritas dan komitmen pimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Pengujian secara simultan berupa kecakapan profesional, integritas, pengalaman kerja dan komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Dalam penelitian Ilat (2015) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Sedangkan dalam penelitian Kneefel, dkk (2017) menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dengan menggunakan variabel yang sama, hal ini mendorong peneliti untuk menguji mengenai pengaruh kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas dan komitmen pimpinan terhadap kinerja APIP di lingkungan inspektorat Kota Gunungstoli.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Katili, dkk (2017). Persamaannya adalah menggunakan variabel yang sama yakni kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas dan komitmen pimpinan sebagai variabel X dan kinerja APIP sebagai variabel Y. Perbedaannya adalah pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas dan komitmen pimpinan terhadap kinerja APIP sedangkan pada penelitian sebelumnya peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja APIP. Kedua, penelitian ini dilaksanakan di daerah kota Gunungstoli,

sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di daerah kota Gorontalo. Ketiga, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode total sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode purposive sampling. Keempat, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan regresi sederhana sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan analisis regresi berganda. Kelima, penelitian ini menggunakan uji statistik F dan T sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan uji statistik T.

Adapun alasan peneliti memilih pemerintah daerah kota Gunungsitoli sebagai lokasi penelitian karena belum pernah ada yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas dan komitmen pimpinan terhadap kinerja APIP di lingkungan inspektorat Kota Gunungsitoli. Selain itu, adanya opini WDP oleh auditor BPK RI untuk tahun buku 2016 dan 2015 sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Kota Gunungsitoli.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas dan komitmen pimpinan terhadap kinerja APIP di lingkungan inspektorat kota gunungstoli”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :



1. Apakah Kecakapan Profesional, pengalaman kerja, integritas serta komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?
2. Apakah Kecakapan Profesional berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?
3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?
4. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?
5. Apakah Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini maka penelitian ini dibatasi pada kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas serta komitmen pimpinan terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Kecakapan Profesional berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?
2. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?

3. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?
4. Apakah Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?
5. Apakah Kecakapan Profesional, pengalaman kerja, integritas serta komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas, serta komitmen pimpinan terhadap kinerja APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil riset penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh kecakapan profesional, pengalaman kerja, integritas serta komitmen pimpinan terhadap kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

2. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kinerjanya sebagai internal auditor/aparat pengawasan pengelolaan keuangan daerah Kota Gunungstoli.

3. Bagi akademis

Penelitian hasil riset ini dapat menjadi bahan informasi dan pedoman maupun salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY